BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Suara Pembaruan
Subyek : AMDAL
Edisi : 9 Februari 2008
Halaman : 14

KLH Tolak Amdal Jalan Layang Sedyatmo

[JAKARTA] Pembangunan jalan layang sepanjang tujuh kilometer di samping jalan tol Sedyatmo, Cengkareng, Jakarta Barat, yang sedianya akan dilakukan Maret ini menyusul tergenangnya kawasan itu, terancam tertunda. Permohonan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dari PT Jasa Marga, ke Kementerian Negara Lingkungan Hidup, ditolak.

Wakil PT Jasa Marga yang ditunjuk pemerintah sebagai kontraktor pembangunan jalan layang tersebut yang menemui Deputi I Menteri Negara Lingkungan Hidup bidang Tata Lingkungan, Hermin Roosita, Jumat (8/2), harus pulang tanpa hasil, karena permohonan untuk memperoleh rekomendasi amdal ditolak. "Kami belum memberi rekomendasi karena beberapa hal masih belum beres. Salah satunya mengenai status keberadaan hutan produksi," ujarnya saat ditemui *SP*, Jumat. Menurut dia, berdasarkan hasil pembicaraan dengan wakil PT Jasa Marga, semua keperluan untuk membangun jalan layang tersebut sudah siap dilakukan, dan hanya menunggu hasil pembahasan dokumen amdal. Menurut Hermin, tanpa dokumen amdal tersebut pembangunan proyek tidak bisa dilakukan, karena dokumen amdal adalah salah satu syarat yang dibutuhkan untuk memperoleh izin suatu proyek pembangunan. "Pembuatan dokumen amdal paling cepat enam bulan," tambahnya.

Sebelumya Departemen Pekerjaan Umum, Maret ini segera akan memulai pekerjaan konstruksi pembangunan jalan layang. Jalan layang ini, menurut Menteri PU, Djoko Kirmanto merupakan solusi yang dipilih untuk mengatasi persoalan banjir yang kerap menggenangi ruas tol Sedyatmo, sehingga mengganggu arus transportasi dari Jakarta ke Bandara Soekarno-Hatta.

Hermin membenarkan, status keberadaan hutan produksi merupakan ganjalan belum dikeluarkannya rekomendasi amdal. Saat ini, pembahasan tentang hutan tersebut sedang dibahas di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salah satu alternatif yang dilakukan, lanjut Hermin, adalah memindahkan hutan yang terkena pembangunan jalan layang ke daerah yang tidak jauh dari lokasi yang ada sekarang.

Audit

Hermin juga menjelaskan, pihaknya juga akan segera melakukan audit terhadap proyek-proyek pembangunan yang ada di wilayah pantai utara (Pantura) Jakarta. Dia juga kembali menegaskan, pihaknya tidak akan segan-segan membawa ke pengadilan jika pihak-pihak yang diaudit nanti tidak mau melaksanakan rekomendasi yang diberikan pemerintah.

Dia mengakui, pembangunan berupa reklamasi di wilayah pantura keliru, karena menggunakan kajian amdal parsial atau amdal lokal. Padahal, untuk wilayah pantura Jakarta harus menggunakan kajian amdal regional karena pembangunan di wilayah pantura Jakarta akan membawa dampak ke wilayah pantura di kabupaten Tangerang. [E-7]

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup